

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Gaffar Karim, 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Abrar Saleng, 2013. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, membumi publishing, Makassar.

_____, 2007. *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Press.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Hal: 202

Ahmad Fikri Hadi, 2013, *Eksistensi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan di era otonomi daerah*, Yogyakarta, Genta Press.

Akhmad Khairuddin. 2010 *Fenomena Keadilan dalam otonomi daerah dalam otonomi daerah, etnonasionalisme dan masa depan Indonesia*, Yayasan obor. Jakarta.

Alma Manuputty, et.al. 2012. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di ZEE Indonesia*. Arus Timur Makassar.

Aminuddin Ilmar, *Hubungan Pusat Daerah dan Konstelasi Demokrasi Indonesia*, Dalam buku memahami Hukum dari konstruksi sampai implementasi, editor; Sarya Arinanto dan Ninuk Triyanti., 2012., Rajawali Pers., Jakarta.

Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.

Amran suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.

Bagir manan, 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, pusat studi hukum UII, Yogyakarta.

_____, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu negara*, Bandung; Mandar Maju.

- Bambang Waluyo, 2002. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”* (2002; Sinar Grafika; Jakarta).
- Bhenyamin Hoessain. 2009. *Perubahan Model, Pola Dan Bantuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Indonesia, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, (Penerbit PT. Alumni),
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Carina Tostes Abreu, *Brazilian Coastal and Marine Protected Areas Importance, Current Status and Recommendations, Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs*, The United Nations New York, 2015,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dian Puji Simatupang. 2004. *Materi Hukum Administrasi Negara*. Program Ekstensi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Dina Sunyowati, 2014. *“Dampak Kegiatan IUU-Fishing Di Indoensia”*, Disampaikan pada seminar Nasional *“Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU-Fishing di wilayah Perbatasan Indonesia”* Kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014.
- Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2013.
- Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Donnelly Gibson. 1996. *Organisasi, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara: Jakarta.
- Farida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Penerbit Rangkang Education. Yogyakarta.

- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermanus Hattu. 2016. Hakikat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Hidayat. 1984. *Sekilas Tentang Pengawasan*. Majalah Keuangan No.125. Hal: 23, Dikutip dalam buku: Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huala Adolf, 2003. *Pengantar Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Press.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, edisi revisi*. Cetakan ke 4:2021, Mirra Buana Media; Yogyakarta.
- Irwan Sudjito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia. Makalah, Disampaikan pada Seminar "Menyoal Moral Penegakkan Hukum"* dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.
- Joko Prakoso, 1984. *Kedudukan dan fungsi kepala daerah serta perangkat daerah lanilia di dalam undang-undang pokok pemerintahan di daerah*, ghlmia Indah, Jakarta.
- Kemitraan Partership, 2011. *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/Partnership, 2011).
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Laut Masa Depan Bangsa (Kedaultan, Keberlanjutan, Kesejahteraan)*. PT,Kompas Media Nusantara.

- Laica Maerzuki. 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta.
- La Ode Husein. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. CV.Utomo: Bandung.
- Lukman Markus.1997. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi Pascasarjana UNPAD: Bandung.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Maringan Masri Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Muchsan, 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Akib, 2014. *Hukum lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Mawardi, Oentato Sindung. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Samitra Media Utama, Jakrta
- M. Solly Lubis. 2008. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Alumni: Bandung.
- Nikijuluw, 2002. *Rezim Pengawasan Pada Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, (Jakarta : Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional).
- Ni'matul Huda, 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

- _____, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Nunung Mahmudah, *Illegal fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Philipus hadjon, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Gadjia Mada University Press.
- Philipus M Hardjon, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjia Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2010. *Tentang wewenang, makalah, Universitas Airlangga*, Surabaya.
- _____, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu Surabaya.
- P. Nicolai. 1994. *Bestuursrecht*. Amsterdam.
- P. Martosubroto dan K. Widaa, 1990, *Pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Hayati laut di perairan Indonesia dan Pengembangan kerjasama Internasional*.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Rahmawati Sururama & Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia, penerbit Cendekia Press-Bandung.
- Ridwan H.R. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sadu Wastiono, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus media. Bandung.

- _____, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka sinar harapan, Jakarta.
- Sjahran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Cet. Kedua. Alumni: Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sirajun dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press
- Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Siswanto Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujanto, 1994, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suko Wiyono, 2006. *Otonomi Daerah dalam negara hukum indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif*, Faza Media, Jakarta.
- Suparlan Suhartono. 2008. *Filsafat Ilmu pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. Cet. 1. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Sri Susyanti Nur. 2010. *Hak Guna Laut dalam Usaha Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan (suatu kajian Hukum Agraria Kelautan)*, Penerbit Pena Press, Makassar.
- S.P. Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. Hal: 107, Dikutip dalam buku: Viktor M. Situmorang. 1998. *Aspek Hukum*

Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah.
Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tatiek Sri Djatmiati. 2004. Prinsip Izin Industri di Indonesia. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

The Liang Gie. 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung gung, Jakarta.

William Tetley, *International Maritime and Admiralty Law, (International Shipping Publication*, Les Editions Yvon Blais Inc, 2002),

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai.

Jurnal :

Abdul Halim, et.al. 2017. Konsep Hak Pengelolaan Perikanan Sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia, *Jurnalkebijakanperikananindonesia*, Volume 9 Nomor 1 Mei 2017 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi: 626/AU2/P2MI-LIPI/03/2015

Amir Syamsuddin dan Nurhasyim Ilyas, 2012. *Perilaku Aparat Penegak Hukum dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia*, *Jurnal Keadilan* , Volume I November.

Calvin Agasta, Peni Susetyorini, L.Tri Setyawanto R, 2017. *Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dashed Line China Di Kepulauan Natuna)*, *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 <https://media.neliti.com/media/publications/217499-none.pdf>

Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2020.

Dewi Wuryandani, Hilma Meilani , 2011. *Kebijakan Pengawasan Pada Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Home > Vol 2, No 1 (2011) >Wuryandani.<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/95>

Edwarsyah, Rina Safrina. 2017. *Indek dan Status Keberlanjutan Pulau Kecil*

Terluar: *Studi Kasus Pesisir Pulo Raya Aceh Jaya*, Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis.
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/20153-Article%20Text-62073-2-10-20200313.pdf

Edy H.P. Melmambessy, 2010. *Pendugaan Stok Ikan Tongkol Di Selat Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Agribisnis dan perikanan (Agrikan UMMU-Ternate), Volume 3 Edisi 1, Mei 2010).

Elli Ruslina, 2012. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.

Farida Patitinggi, 2013. *"Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia," BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, no. 5 (2013), <http://stpn.ac.id/jurnalbhumi/JB/article/download/168/148>.

Indah Susilowati, 2012. *Menuju Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Ekosistem: Studi Empiris Di Karimunjawa, Jawa Tengah*. Penelitian Hibah Kompetensitahun Anggaran 2012.
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/19514199.pdf

Lucky Andrianto, *Implementasi Code of Conduct For Responsible Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang*, Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Volume 2 Nomor 3, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005),

Maulana Firdaus, 2016. *Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dalam Konstruksi Peraturan Di Indonesia*, Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol.2.No.1 Tahun 2016:1-7.
<http://ejournalbalitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/download/3280/3593>

Marilang, 2012. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

Melda Kamil Ariadno, *Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas*, dalam Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Volume 2 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga

Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005).

Muhammad Haris Zulkarnain, Kholis Roisah, Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia, (Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No.4 Desember 2018).

Muhammad Insan Tarigan, Upaya Konservasi Indonesia Atas Sumber Daya Ikan Di Laut Lepas Indonesia (Conservation Efforts to Resources of Fish in the High Seas), Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.

Muhammad Reza Rustam, Kenshusei Indonesia Pada Sektor Perikanan Jepang. *indonesian jorna of japanes studies*.

Mukthie Fadjar, *Pasal 33 UUD 1945, Ham dan UU SDA*, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2 2005.
http://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945__DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf

Muluk Alains A Dkk, 2009. *Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (Pspbm) Melalui Model Co-Management Perikanan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.2, Desember 2009, hlm. 172 – 198.
<file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/83729-ID-none.pdf>

Muhayat, Haslita. 2022. *Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan*, Jurnal JAPS, Volume 3. Nomor 1 April 2022

Muhayat, Rina Haslita, 2021. *Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan*. Jurnal JAPS. Volume 2, Nomor 2 Agustus, 2021.

Mirna Dwirastina, 2019. *Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Sungai Kumbe Kabupaten Merauke Provinsi Papua*, Jurnal Ilmu Lingkungan . DOI: <https://doi.org/10.14710/jil.17.3.435-442>.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/22902>

Normayanti Rambe, 2018. *“Analisis Penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri No. 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan*

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Ri Sebagai Upaya Perlindungan Te,” Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 1, no. 3 (2018): 82–91.

Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama. Yogyakarta, 2008*

Oly Viana Agustine, 2014. *Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015.* Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.

Rachmat Trijono, 2015. “*Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan,*” *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2015)*

Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia.,* Jurnal Ilmiah Platax Vol.1-2, Januari 2013. <http://ejournal.unsrat.ac.id>

Rokhimin Dahuri, 2001. *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah,* Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Pusat Penerbit Universitas (P2U). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>

Sandy Nur Ikfal Raharjo, “*Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong) Indonesia’s Policy On The Land Border Area Management With Malaysia (An Evaluative Study In The Entikong District),*” *Widyariset 16, no. 1 (2013): 71–79.*

Sumaryo Suryokusumo, “*Yurisdiksi Negara Vs Yurisdiksi Ekstrateritorialitas*”, *International Journal of International Law, UI, Vol 2 Nomor 4 Juli 2005,*

Sulaiman, 2010. *Tantangan Pengelolaan Perikanan Di Indonesia,* KANUN No.52 Edisi Desember 2010. Hal 515 -542. [http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6307/5196.](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6307/5196)

Yijin J. Lee, “*The Lacey Act Amendments of 2008: The World’s First Ban on Illegal Logging Combats Deforestation But Gets Stumped by Foreign Laws,* *San Diego Journal of Climate & Energy Law, Vol. 5 187, 2013,*

Zahri Nasution dan Arman Zulham, "*Prakiraan Dampak Ancaman Dan Gangguan Dalam Perikanan Tangkap Dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan*", Kebijakan Sosek KP Vol.3, No.1 Tahun 2013.

Disertasi :

Basri, pada tahun 2016 dengan judul "Pengelolaan Sumber daya Kelautan Menurut Hukum Agraria". Pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2016.

Elli Ruslana pada tahun 2010 dengan judul "pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar Perekonomian Indonesia" pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta di tahun 2010.

Herma Yanti, 2004. *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*

Hermanus Hattu pada tahun 2016. *Hakikat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Julianto Jover Jotam Kalalo, dengan judul "Politik hukum perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat didaerah perbatasan", disertasi ini dengan focus penelitian pada hakekat perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat didaerah perbatasan

Kahar Lahae, "Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan (The Spatial Planning Of Coastal And Marine Areas On The Law And Justice Perspective)" (Universitas Hasanuddin, 2016

Maurice Knight, Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Amerika Serikat: Contoh bagi Indonesia, Penerbitan khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA, 2001,

Richard Marsilio Waas pada tahun 2019 dengan judul penelitian "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Perbatasan Laut (Utilization of oil and gas natural resources in the sea border area)". Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ditahun 2019

Khelda Ayunita pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Reformulasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir disulawesi selatan”. Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ditahun 2020.

Artikel :

Ahmad Redi.2015.*Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Dynamics of State Control Concept on Natural Resources)*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. S Parman No.1 Grogol, Jakarta Barat, E-mail:ahmadr@fh.untar.ac.id, di akses tanggal 23 september 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>

Ardi, Jenis-Jenis Pengawasan, <http://www.psychologymania.com>, Diakses pada 12 Desember 2022

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tentang *Pengelolaan Sumber Daya Alam (SUMBER DAYA ALAM)*, dalam Artikel yang di akses pada tanggal 7 September 2020 https://bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf.

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2011. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP.

Baigo Hamuna, Annisa Novita Sari dan Alianto, 2018. Kajian Kerentanan Wilayah Pesisir Ditinjau dari Geomorfologi dan Elevasi Pesisir Kota dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 6 (1), 1-14 <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.6.1.1-14>,

Budiman, 2006. *analisis sebaran ikan demersal sebagai basis pengelolaan sumberdaya pesisir di kabupaten kendal*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/16886/1/budiman.pdf>, di akses pada 25 September 2020

Budi Yuwono, harus dilaksanakan rekomendasi KY, <http://www.suamerdeka.com>. Diakses pada 12 Desember 2022.

J.Ronald Mawuntu, 2012. *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Hlm.17. Vol.XX/No.3/April-Juni/2012. Di akses pada 23 September 2020. https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945__DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf

Lyam Assyifarahmah, 2012. Pengawasan. <http://lyamarsady.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false.html>, diakses pada 12 Desember 2022

Marilang, 2012. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*. Dalam artikel Makassar Email: marilang_s@yahoo.com. Di akses pada 23 september 2020. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/922/130>

Martha, https://www.researchgate.net/publication/228221977_Pembangunan_Berkelanjutan_Ekonomi_Dan_Ekologi_Sustainability_Communication_Dan_Sustainability_Reporting/link/56d52f8a08aed6a7b275d2f1/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uliwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19, di akses pada hari senin 20 september 2021.

Nale, Pengertian Pengawasan dan Prinsip Pengawasan, <http://ilmuekonomi.com>., diakses pada 12 Desember 2022

Pandapotan Sianipar, Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional Implementasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan, <http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/file/137/aspek-legal-instrumen-hukum-internasional-implementasi-pengawasan-sumberdaya-perikanan.pdf>, diakses pada pukul 13.00 Wlta, tanggal 22 Oktober 2023.

Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. 2011. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI.

Pusat kebijakan APBN, 2020. *Optimalisasi PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jakarta.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/kajian%20PNBP.pdf>

Peraturan presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2010 tentang BNPP. (<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/415.pdf> diakses 25 November 2020)

Portal resmi SKPT Sebatik, <https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/page/1113-scpt-sebatik>, Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, di akses pada tanggal 23 September 2022, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Dit%20P4K-PRL/Bahan%20Paparasi/Bimtek%20Pengelolaan%20Kinerja/3%20Roren%20KKP%20-%20Renstra%20KKP%202020-2024.pdf>

Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024, di akses pada 23 September 2022. <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiun-tarakan/page/7327-rencana-strategis-stasiun-psdkp-tarakan-tahun-2020-2024>

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/06/bongkar-kasus-ilegal-fishing-di-perairan-sebatik-polairud-polda-kaltara-tangkap-wna-filipina>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita.

<https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/artikel/12999-iuu-fishing-masih-terjadi-di-sebatik>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, diakses pada hari selasa 22 september 2020, <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>

[http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Norway_Constitution_1814_\(as%20amended\)_en.pdf](http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Norway_Constitution_1814_(as%20amended)_en.pdf), diakses 27 Maret 2020.

Thomasden, Apa yang dimaksud pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, lihat <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud->

pengelolaan-perikanan-tangkap-berkelanjutan/8456/1, di akses pada hari senin 20 september 2021

Pengelolaan Sumberdaya perikanan, yang di akses pada hari selasa 22 september 2020. Hlm.6-11, <https://docplayer.info/99227786-Tinjauan-pustaka-2-1-pengelolaan-sumberdaya-perikanan.html>

The Constitution Of Japan,
http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html, diakses 27 Maret 2020

<https://kabar24.bisnis.com/read/20171205/78/715206/stasiun-psdkp-tangani-22-kasus-ilegal-fishing-di-kaltara>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/06/bongkar-kasus-ilegal-fishing-di-perairan-sebatik-polairud-polda-kaltara-tangkap-wna-filipina>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita.

Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019". www.kaltara.bp.go.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara. Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

Portal Resmi Provinsi Kalimantan Utara,
<https://kaltaraprov.go.id/profil/geografis>. Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Renstra) Tahun 202-2026. Diperoleh dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

Zulfikar,2012, Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Perairan Selatan Palabuhan Ratu.
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298952-T30266%20-%20Pengelolaan%20perikanan.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI 2004, Nomor 104, TLN nomor 4421)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN RI Nomor 125), atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 Nomor 118, TLN RI Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244) menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (LN RI Tahun 2014 Nomor 2, TLN Nomor 5490), Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (LN RI Tahun 2007 Nomor 84, TLN RI Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (LN RI 2014 Nomor 294)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, atas perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengawasan Pada Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati Di *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata kelola Sektor Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 111/MEN-SJ/KP-444/VIII/2018 tentang Pemberian Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Budidaya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Printis di Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan.